
Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Meiatrix Tumadang¹
Fanley Pangemanan²
Neni Kumayas³

ABSTRAK

Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana. Dalam rangka meminimalisir Potensi Bencana maka dibentuklah BPBD dengan aturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Atas dasar ini maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”. Berdasarkan hasil penelitian masih ada program khusus dari bencana alam belum terlaksana. Hal tersebut diakibatkan kurangnya dana untuk program kerja dari BPBD karena sebagian diahlikan ke penanggulangan Covid 19. Meski masyarakat sudah mampu mengontrol diri disaat kondisi darurat dengan mengikuti jalur evakuasi yang harus dilewati, namun masih ada masalah yang terjadi dalam pemberian bantuan bencana yaitu timbul dari masyarakat yang tidak melakukan pengungsian dan tidak menerima bantuan bencana. Masalah yang terjadi ialah Kurangnya sosialisasi dari pemerintah karena kampung yang terkena dampak dari bencana alam tersebut jauh dari pusat kota waktu yang ditempuh lebih dari 1 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang kurang baik. Rehap rekon pasca bencana untuk jalan yang terputus akibat bencana alam sampai sekarang belum ada tindakan dari pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut.

Kata Kunci : Kinerja, BPBD, Bencana

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ratusan juta penduduk dan banyak pulau yang tersebar dari ujung barat yaitu Sabang sampai ujung timur yaitu Merauke. Letak Indonesia berada di antara pertemuan 2 lempeng Samudera yaitu lempeng Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dan di antara 2 lempeng Benua yaitu lempeng Benua Asia dan Australia. Secara geologi, geofisika, dan oseanografi serta posisi tengah yang dilintasi oleh poros utama bumi yakni khatulistiwa, Indonesia memiliki iklim tropis yang terdiri dari 2 musim yang berbeda yaitu musim kemarau dan musim hujan. Secara letak geografis, Indonesia berpotensi cukup tinggi terhadap terjadinya sebuah bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, dan bencana lainnya.

Kondisi alam Indonesia menyimpan potensi kekayaan yang melimpah namun sewaktu-waktu dapat menimbulkan bencana baik karena alam ataupun karena manusia. Seiring berjalannya waktu dalam rangka meminimalisir potensi bencana maka dikeluarkannya Peraturan Presiden no. 8 tahun 2008 di bentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB merupakan badan yang menangani masalah kebencanaan dalam hal pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Untuk menanggulangi bencana di Indonesia, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana kewenangan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, maka masing-masing pemerintah daerah harus memulai meningkatkan kemampuannya untuk dapat secara mandiri dapat mengatasi permasalahan kebencanaan di daerah yang bersangkutan.

Pemerintah bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi rakyatnya dalam segala bentuk ancaman diantaranya dari bencana alam, hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Tahun 1945 Alinea Ke-IV (empat) diamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dengan letak geografis 02° 45' 00" LU dan 125° 23' 59" BT. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yaitu Ondong Siau terdapat di pulau, Pulau Siau memiliki gunung berapi yang masih aktif yaitu gunung karangetang. Di Sitaro terdapat Tujuh jenis bencana alam diantaranya adalah Banjir Bandang, Puting Beliung, Gelombang Pasang, Luncuran Lahar Hujan, Kebakaran Lahan dan Hutan, Erupsi Gunung Karangetang dan Tanah Longsor. Namun Yang paling dominan terjadi di pulau Siau yaitu letusan gunung berapi karangetang karena gunung tersebut adalah salah satu gunung berapi aktif di Indonesia.

Gunung api karangetang setiap tahunnya akan melakukan aktivitas mengeluarkan abu vulkanik ataupun lahar. Karena itu perlu adanya tanggapan serius dari pemerintah dalam bagaimana penanggulangan bencana alam tersebut agar tidak terjadi banyak kerugian.

Hasil dari observasi awal saya Pemerintah Daerah kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro harusnya dapat meminimalisir dampak dari meletusnya gunung api karangetang dimulai dengan adanya jalur Evakuasi umum dan melakukan Sosialisasi secara menyeluruh

ke masyarakat. tetapi dari kenyataan hasil observasi awal, yang saya lihat terkait dengan bencana alam ini masyarakat masih melakukan evakuasi mandiri dilokasi yang lebih aman dan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh ke masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana. Dalam rangka meminimalisir Potensi Bencana Maka dibentuklah BPBD oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro".

Adapun rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah Bagaimana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro?. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk peneliti-peneliti selanjutnya terkait dengan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau evaluasi buat pemerintah terkait dengan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain secara horistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentative. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan .

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam penunjang pengumpulan data adalah Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Yang menjadi fokus dalam penelitian saya dengan mengambil konsep dari Agus Dwiyanto (2006 : 50) mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas

Adapun informan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: Kepala Pelaksana, Sekertaris, Kepala Sub bagian Program, Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan di Kantor BPBD kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan masyarakat yang terkena dampak bencana alam gunung api karangetang. Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu : Wawancara,

Observasi, Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis maupun film lain dari yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti.

2. Hasil dan Pembahasan

Secara Administratif Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan Kabupaten Otonom baru yang dimekarkan dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang secara Yuridis formal pembentukannya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 3.066,95 Km² yang terdiri dari luas daratan 275,95 Km² (9%) dan luas lautan 2.791 Km² (91%).

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut.

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku;
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara;
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan salah satu daerah kepulauan yang berada pada bagian Utara dari Semenanjung Pulau Sulawesi, terletak di antara 2^o 4'10"–2^o48' 42" LU dan 125^o 9'20"–125^o29'25" BT. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terangkai dari tiga gugusan pulau besar dan beberapa gugusan pulau kecil.

Gugusan Pulau-pulau tersebut dikelompokkan dalam Lima klaster pengembangan yaitu Klaster Makalehi, Klaster Siau, Klaster Tagulandang, Klaster Biaro, dan Klaster Pahepa, dengan luas daratan secara keseluruhan mencapai sekitar 275,95 km². Salah satu diantara gugusan pulau kecil yaitu Pulau

Makalehi merupakan tapal batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Filipina di bagian utara dan Perairan Negara Bagian Sabah Malaysia di sebelah barat. Posisi Pulau Makalehi sebagai salah satu Pulau terluar Indonesia ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005.

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan kumpulan dari 47 gugusan kepulauan, dimana 10 pulau berpenghuni dan 37 pulau tidak berpenghuni. Sampai dengan Januari 2021, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebanyak 72.903 jiwa, yang terdiri atas 36.700 jiwa laki-laki dan 36.203 jiwa perempuan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tipe B dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 07 Tahun 2010 dengan susunan Organisasi sebagai berikut: Kepala Badan, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan, Kepala Sub Bidang Pencegahan, Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi, Kelompok Jabatan Fungsional, Pengarah : Instansi/Dinas/badan/Profesional/Ahli.

Untuk meminimalisir potensi bencana gunung api karangetang di kampung Batubulan maka diperlukan kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan Bencana alam gunung api karangetang di Kampung Batubulan, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Melihat seberapa besar kinerja dari Badan penanggulangan bencana daerah, maka penulis melakukan wawancara langsung kepada Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam gunung api karangetang. Adapun yang menjadi fokus penelitian saya dalam mengukur kinerja birokrasi publik berdasarkan lima indikator yaitu: Produktivitas, Kualitas Layanan,

Responsivitas, Responsibilitas,
Akuntabilitas.

Pembahasan dilakukan pengacu pada hasil penelitian dengan pembahasan menggunakan 5 indikator, yaitu:

a. Produktivitas

Kinerja yang dilakukan pemerintah sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya tujuan dari organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Begitu juga dengan kinerja dari Badan Penggulangan Bencana Daerah dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, program khusus untuk penanggulangan bencana ada beberapa sudah dilaksanakan, namun ada juga yang belum seperti kurangnya sosialisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang perkembangan dan bahaya bencana alam gunung api karangatang serta bagaimana sikap dari masyarakat menghadapi situasi darurat tersebut. Yang berikutnya yaitu rehap rekon pasca bencana untuk jalan yang terputus akibat bencana alam itu belum dilakukan, jalan tersebut merupakan jalan utama untuk menuju kepusat kota dengan begitu banyak aktivitas yang harus dilakukan masyarakat.

b. Kualitas Layanan

Pemerintah wajib melayani seluruh warga Negara untuk memenuhi hak-hak dasar dan segala kebutuhannya. Dalam kerangka kerja layanan publik yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa membangun kepercayaan publik terhadap layanan publikoleh penyedia layanan publik adalah kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan harapan dan tuntutan semua warga negara. Demikian halnya dengan menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci keselamatan. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dilakukan oleh Pemerintah. Demikian juga di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang adalah wilayah rawan akan bencana alam,

keselamatan dari setiap anggota masyarakat merupakan tanggungjawab dari Pemerintah. Melalui jalur Evakuasi yang dibuat oleh Pemerintah dapat membantu anggota masyarakat disaat kondisi darurat sebelum terjadi bencana sehingga masyarakat tidak akan lari kejalan yang akan mencelakakan mereka.

Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah yaitu penyaluran bantuan ke tempat pengungsian, bantuan yang diberikan berupa sembako sudah mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan masyarakat disaat melakukan pengungsian. Dalam bantuan tersebut juga terdapat kasur yang dibagikan saat pengungsian dan hanya diberikan bagi anggota masyarakat yang mempunyai balita saja, Tetapi ada juga masyarakat yang tidak melakukan pengungsian mengeluh akibat tidak menerima bantuan dari pemerintah, masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut hanya masyarakat yang melakukan pengungsian, Padahal masyarakat yang tidak melakukana pengungsian adalah masyarakat dikampung Batubulan, dan mereka juga dapat merasakan dampak dari bencana akibat jalan terputus dan mendapat kesulitan dalam mencari bahan makanan untuk kehidupan sehari-hari.

c. Responsivitas

Respon dari BPBD ketika ada masyarakat yang mempunyai keinginan mengatur sendiri seperti ada sekeluarga yang tidak menerima BPBD membangun rumah mereka dikampung paseng sebagai tempat yang lebih aman untuk merak tinggal, mereka lebih memilih untuk tetap tinggal dikampung Batubulan karena mempunyai tanah lain yang lumayan jauh dari lokasi bencana. Dalam hal ini pemerintah sudah mengambil solusi yang baik melalui menerima masukan-masukan dari masyarakat serta memberikan pencerenerahan dan resiko yang akan diterima oleh masyarakat itu sendiri. sehingga hanya 5 (lima) bantuan rumah masyarakat yang menyetujui untuk tinggal dikampung Paseng.

Menurut informasi yang peneliti peroleh dari hasil penelitian dan melakukan wawancara dengan

pemerintah dan masyarakat kampung Batubulan, bantuan rumah yang diberikan oleh BPBD sebenarnya tidak layak huni bagi anggota keluarga yang penghuninya lebih dari 2 (dua) orang. Karena mempunyai ruangan rumah yang sangat sempit, dan juga sarana prasarana tidak memadai untuk ditempati seperti tidak ada penyediaan air bersih yang akan digunakan sehari-hari oleh masyarakat serta kurangnya wc yang dibuat oleh pemerintah karena hanya terdapat 1 (satu) buah wc dan digunakan untuk 5 (lima) rumah.

Ada juga keluhan dari masyarakat mengenai kerugian akibat bencana alam tersebut karena ada beberapa pohon pala dan kelapa yang terbawa saat bencana itu, hal ini sudah dibahas dalam rapat bersama dengan pemerintah kampung Batubulan sehingga diminta data bagi masyarakat yang terkena dampak bencana namun sampai saat ini belum ada respon atau tindakan dari pemerintah itu sendiri.

d. Resposibilitas

Kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pelayanan Administrasi di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku saat ini. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dikampung Batubulan, kinerja dari BPBD saat terjadinya bencana alam gunung api karangetang dilakukan secara cepat, tepat, efektif dan efisien.

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat yang tinggal didaerah yang rawan akan bencana alam, begitu juga dengan masyarakat yang tinggal di kampung Batubulan memerlukan informasi terkini tentang bagaimana perkembangan dari gunung api karangetang dan seberapa besar bahaya dari letusan gunung berapi tersebut. Sosialisasi merupakan solusi yang baik dalam memberi informasi dan melakukan pendekatan dengan masyarakat, namun sampai saat ini BPBD masih kurang dalam memberi sosialisasi atau edukasi lewat peneras

suara tentang hal tersebut. Hanya saja kebijakan dari pemerintah kampung untuk membuat tanda peringatan dini dan dibunyikan ketika masyarakat harus melakukan pengungsian ketempat yang lebih aman.

e. Akuntabilitas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah memberikan pertanggung jawaban terhadap instansi melalui laporan keuangan yang setiap tahunnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian pertanggung jawaban kepada masyarakat yaitu semua kebutuhan disaat pengungsian terpenuhi dan dibuat laporan atas masuknya bantuan ditempat pengungsian dan ditandatangani oleh koordinator ditempat pengungsian.

Berdasarkan hasil penelitian perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk melakukan pembangunan jalan beton jalur darat yang terputus akibat bencana gunung api karangetang, jalan yang digunakan sampai saat ini oleh masyarakat dikampung Batubulan hanya hasil gotong royong dari masyarakat dalam membuat jembatan dari kayu, peneliti turun langsung ke kampung Batubulan dan melihat jembatan yang dibuat itu sebenarnya tidak layak pakai karena beresiko besar bagi masyarakat yang melewati jembatan itu. Masyarakat terpaksa harus melewati jembatan tersebut karena jalan itu merupakan jalan utama bagi masyarakat kampung Batubulan pergi kepusat kota, dengan begitu banyak aktivitas yang harus dilakukan baik itu anak sekolah, pekerjaan dan lain sebagainya.

3. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Penelitian tentang Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dilihat dari 5 Indikator Kinerja yaitu : Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Berdasarkan hasil rangkuman wawancara dan pembahasan,

sebagaimana telah dilakukan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian masih ada program khusus dari bencana alam belum terlaksana. Hal tersebut diakibatkan kurangnya dana untuk program kerja dari BPBD karena sebagian diahlikan ke covid.
2. Masyarakat sudah mampu mengontrol diri disaat kondisi darurat dengan mengikuti jalur evakuasi yang harus dilewati, namun masih ada masalah yang terjadi dalam pemberian bantuan bencana yaitu timbul dari masyarakat yang tidak melakukan pengungsian dan tidak menerima bantuan bencana, mereka juga selaku masyarakat yang tinggal dikampung batubulan dan merasakan dampak bencana melalui jalan yang terputus. Saat itu pemerintah hanya memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi bencana untuk dilakukan pengungsian dan diberikan bantuan.
3. Hasil wawancara dengan kepala pelaksana BPBD masalah yang terjadi ialah masyarakat tidak mau untuk tinggal tetap dirumah bantuan yang diberikan pemerintah sebagai tempat tinggal yang lebih aman, rumah tersebut sangat kecil dapat dikatakan tidak layak huni karena tidak baik untuk dihuni bagi anggota keluarga yang lebih dari dua orang, tidak disediakan air bersih oleh pemerintah bagi masyarakat penghuni rumah tersebut serta wc hanya ada satu untuk digunakan lima rumah.
4. Masalah yang terjadi ialah Kurangnya sosialisasi dari pemerintah karena kampung yang terkena dampak dari bencana alam tersebut jauh dari pusat kota waktu yang ditempuh lebih dari 1

jam perjalanan dengan kondisi jalan yang kurang baik. Hal tersebut yang membuat pemerintah malas untuk sering berkunjung memberikan sosialisasi.

5. Rehap rekon pasca bencana untuk jalan yang terputus akibat bencana alam sampai sekarang belum ada tindakan dari pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut, kondisi tempat membangun jalan dilokasi bencana belum bisa dilakukan pembangunan karena adanya pasir yang begitu banyak keluar dari gunung karangetang menutupi tanah yang akan dibangun pondasi dari jalan tersebut, jika dipaksakan untuk membangun jalan dalam kondisi sekarang hanya akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah.

b. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa saran, dalam pelaksanaan kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah lebih teliti dalam memilih mana program khusus bencana alam gunung api karangetang yang paling penting yang harus dilaksanakan terlebih dulu agar potensi bencana alam tersebut dapat terminimalisir dan tanpa memakan korban jiwa.
2. Berdasarkan hasil penelitian saya dikampung Batubulan, mengenai bantuan bencana alam yang masuk itu sebaiknya semua masyarakat yang ada dikampung Batubulan berhak menerimanya tanpa terkecuali. Walaupun masyarakat yang tidak melakukan pengungsian mereka juga merasakan dampak dari bencana tersebut karena jalan jalur darat terputus sehingga mereka kesulitan untuk membeli bahan

- makanan dan harus melintasi jalur laut.
3. Bagi BPBD dalam pemberian bantuan rumah bagi masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi bencana agar dibuat sesuai dengan kondisi dari keluarga penghuni rumah tersebut, dan setiap rumah mempunyai wc masing-masing serta penyediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga harus ada, Masyarakat tidak mau tinggal di lokasi tersebut karena dapat dibilang tidak layak huni.
 4. Dihimbau bagi pemerintah untuk lebih sering melakukan sosialisasi tentang bagaimana perkembangan dan seberapa besar bahaya dari gunung api karangatang bagi masyarakat kampung Batubulan.
 5. Perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah kepada kampung Batubulan mengenai pembangunan infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana alam gunung api karangatang, Karena itu merupakan jalan utama untuk digunakan masyarakat pergi ke pusat kota.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, Agus, dkk. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press
- Saleh, Choirul, dkk. (2020). *Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Hidayati, Deny, dkk. (2019). *Siapakah Penduduk Menghadapi Ancaman Multibencana di Perdesaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Hayat. (2016). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Mukarom, Zaenal, dkk. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan*

- Publik Menuju Clean Government and Good Governance*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Mulyadi, Deddy, dkk. (2018). *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabet
- Sedarmayanti, dkk. (2020). *Membangun dan Mengembangkan Human Capital Unggul Melalui Pendidikan, Kinerja, & Produktivitas Kerja di Era Industri 4.0*. Bandung: PT Refika Aditama
- Rismawati, dkk. (2018). *Evaluasi Kinerja penilaian kinerja atas dasar prestasi kerja berorientasi kedepan*. Ternate: Celebes Media Perkasa
- Fresly, John. (2019). *Factor pengaruh kebijakan keterbukaan informasi dan kinerja pelayanan publik*. Jakarta: CV. Budi Utama
- Wilade, Jessica. (2019). *Peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana alam gunung api karangatang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*. Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat

Sumber lainnya:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Presiden no. 8 tahun 2008 di bentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Bupati kepulauan Siau Tagulandang Biaro nomor 4 tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.